

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

PPID PROVINSI JAWA TIMUR



DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR
JL. A YANI NO. 242-244 SURABAYA
TELP (031) 8294608 FAX (031) 8294517
EMAIL : PPIDPROV@JATIMPROV.GO.ID
WEBSITE : JATIMPROV.GO.ID



INFORMATIKA

B A B I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik dan Tugas Pokok Fungsi Seksi Layanan Informasi Publik

1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakannya. Mulai Tahun 2009 Sosialisasi UU tersebut sudah dilaksanakan di beberapa Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, BUMN, BUMD dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Provinsi Jawa Timur awal tahun 2010 mencuri start lebih awal untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, meski Peraturan Pelaksanaan (PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP) dan Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedum PPID saat itu belum ditetapkan.

Memasuki perjalanan Tahun ke sepuluh pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pembentukan PPID sudah mencapai 100 persen. Namun dalam pelaksanaannya masih dinilai kurang optimal. Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 mengganti Permendagri Nomor 35 Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil reaksi cepat dengan menyesuaikan perubahan yang diatur dalam Permendagri tersebut dengan membuat Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur No 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai dasar operasional PPID Badan Publik di Jawa Timur dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur No 65 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Perkembangan umum peningkatan pelayanan informasi di Jawa Timur terkait Implementasi UU KIP, hingga akhir tahun 2020 untuk seluruh Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah membentuk PPID dan dalam tugas dan fungsinya berjalan dengan baik dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional PPID. Demikian pula pembentukan PPID Badan Publik di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur mendapat respon positif terlebih dengan adanya motivasi dari Komisi Informasi (KI) Jawa Timur menyelenggarakan PPID Award setiap tahun, dengan melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan PPID di masing-masing Badan Publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sisi lain juga mendorong dan menggugah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di

lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2. Tupoksi Seksi Layanan Informasi Publik

Tupoksi Seksi Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
- c. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi layanan informasi publik;
- e. menyiapkan bahan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan sajian layanan informasi;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat;
- h. menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B A B II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- 1.1 Melalui website <http://jatimprov.go.id/ppid>
- 1.2 Help desk/layanan langsung/frontdesk
- 1.3 Melalui telepon
- 1.4 Majalah digital dan brosur
- 1.5 Media elektronika / televisi
- 1.6 Tatap muka / sosialisasi / Bimtek / FGD / Rakor
- 1.7 Media sosial /twitter
- 1.8 Klinik PPID
- 1.9 Pengembangan aplikasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik Online (SIKIPO)
- 1.10 Ruang Baca
- 1.11 Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR!

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :

Secara operasional PPID Provinsi Jawa Timur didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/OPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur) yaitu :

- 2.1. Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Pembina;
- 2.2. Sekda Provinsi Jawa Timur selaku Atasan PPID;
- 2.3. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur selaku Ketua dan Sekretariat PPID;
- 2.4. Bappeda Provinsi Jawa Timur;
- 2.5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Jatim ;

- 2.6. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur;
- 2.7. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur;
- 2.8. Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

3. Anggaran Pelayanan Informasi serta penggunaannya

1. Tahun Anggaran 2019, melalui APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan program kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Honorarium Anggota PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 234.000.000,- / tahun
 - 1.2. FGD PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 17.000.000,-
 - 1.3. Bimtek Petugas Help Desk PPID Se wilayah kerja Bakorwil di Jawa Timur sebesar Rp. 71.000.000,-
 - 1.4. Rakor PPID OPD dan Kab/Kota se-Jatim sebesar Rp. 20.950.000,-
 - 1.5. Sosialisasi SP4N-LAPOR! bagi OPD dan Kab/kota se Jawa Timur sebesar Rp. 28.700.000,-
 - 1.6. Jasa konsultasi PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 30.000.000,-
2. Tahun Anggaran 2020, melalui APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan program kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Honorarium Tim PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 168.000.000,00/tahun
 - 2.2. FGD PPID Provinsi Jawa Timur tiga kali kegiatan sebesar Rp. 13.800.000,00
 - 2.3. Bimtek Uji Konsekuensi PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp.98.700.000,-
 - 2.4. Rakor PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp.98.700.000,-
 - 2.5. Rakor SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp.98.700.000,-
 - 2.6. Jasa konsultasi PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 33.000.000,-
 - 2.7. Monitoring dan evaluasi PPID sebesar Rp. 86.400.000,-
 - 2.8. Monitoring dan evaluasi SP4N-LAPOR! sebesar Rp. 23.600.000,-

B A B III

Rincian Pelayanan Informasi

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1.	Poros Pemuda Jawa Timur	9 hari			v	Informasi tersebut belum didokumentasikan/tidak dikuasai PPID Provinsi Jawa Timur
2.	Danu Wibisono	16 hari			v	Informasi tersebut belum didokumentasikan/tidak dikuasai PPID Provinsi Jawa Timur
3.	Annisa Putri Afifa	8 hari		v		1. Dimohon untuk melengkapi persyaratan sesuai mekanisme yang berlaku 2. Menjelaskan bahwa informasi terkait anggaran sudah di upload di website pemprov jatim dengan alamat transparansi.jatimprov.go.id
4.	Justitia Legal Advocay Bureau	3 hari			v	Kesalahan Tujuan Permohonan Informasi
5.	Eka Chandra Wibawa				v	Permohonan informasi yang diminta tidak jelas
6.	Budiwiono	3 hari		v		1. Disarankan melengkapi persyaratan sesuai mekanisme permohonan 2. Disarankan membuka link jdih.jatimprov.go.id
7.	Arwana Studio Konsultan Jalan dan jembatan (Adana Qulbi Panji Islami)	5 hari			v	1. Disarankan mencantumkan tujuan yang jelas 2. Disarankan melengkapi persyaratan sesuai mekanisme permohonan
8.	Miftahul Ullum	3 hari			v	Direspon melalui telp tetapi tidak diangkat
9.	Arwana Studio Konsultan Jalan dan jembatan (Adana Qulbi Panji Islami)	3 hari		v		Permohonan informasi tersebut di teruskan ke : - Dinas Perhubungan Prov. Jatim - DLH Prov. Jatim - Bappeda Prov. Jatim - Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim - Disbudpar Prov. Jatim - Dinas ESDM Prov. Jatim - Biro Adm. Perekonomian Prov. Jatim
10.	Azzuri Inggil Pambudi	9 hari		v		Permohonan informasi tersebut didisposisikan ke Biro Adm perekonomian Setda Prov.Jatim
		16 hari (tambahan waktu untuk menjawab permohonan)	v			Permohonan sudah dijawab oleh Biro Adm perekonomian Setda Prov.Jatim Melalui surat ke Dinas Kominfo Jatim tanggal 6 Juli 2020 Nomor 976/9136-1/021.3/2020
11.	Arwana Studio Konsultan Jalan dan jembatan (Adana Qulbi Panji Islami)	5 hari		v		Permohonan informasi tersebut didisposisikan ke BPBD dan Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim
12.	R. Ayu Nadia Nur Soraya	11 hari		v		Permohonan informasi tersebut diteruskan Bapenda Prov.Jatim
13.	Diana Istislam	10 hari			v	Permohonan tersebut termasuk permohonan administrasi dan disarankan langsung mengajukan permohonan ke Gubernur Jatim, c.q BPKAD Jatim
14.	Saleh Alhasni	9 hari			v	Permohonan informasi yang diminta tidak dalam penguasaan PPID Prov. Jatim
15.	Eka Candra Wibawa	8 hari			v	Disarankan memperjelas permohonan informasi yang diminta dengan melampirkan TOR /proposal kajian
16.	Muhammad Nurcahyo	16 hari		v		Diberikan ringkasan DPA dan LRA Diskominfo Bidang IP dan KP ta 2018 dan 2019
17.	Elinda Purwanti	9 hari	v			Dijawab melalui WA informasi alamat dan nomor telepon RSUD dr. Saiful Anwar Malang
18.	Roesma Fakhanna Fiddin-Jombang	1 hari			v	Ketika hendak dihubungi melalui telepon, nomor tidak terdaftar
19.	Alvin Juliansyah Putra	12 hari		v		Disarankan melengkapi permohonan informasi yang diminta dengan melampirkan TOR /proposal kajian, Surat keterangan dari Universitas.Menyarankan membuka link transparansi.jatimprov.go.id
20.	Rahmat Faisal (Koordinator Kontras)	9 hari			v	Permohonan informasi tidak berada dalam penguasaan PPID Provinsi Jawa timur dan disarankan untuk mengajukan permohonan tersebut ke PPID terkait yang menangani beserta melengkapi persyaratan permohonan sesuai mekanisme yang berlaku
Jumlah sementara			20			Permohonan

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

Tahun 2020							
NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIPERLUKAN	TUJUAN	KEPUTUSAN/JAWABAN	TANGGAL JAWABAN
1.	30 Desember 2019	Poros Pemuda Jawa Timur	LSM	1. DPA KONI 208 s.d 2019 2. RAB KONI 208 s.d 2019 3. SPJ KONI 208 s.d 2019 4. Data Salinan proposal dan Dana hibah beserta RAB KONI 208 s.d 2019	Sebagai bentuk peran serta dalam penyelenggaraan negara	Dijawab melalui surat tanggal 13 Januari 2020, no : 065/212/114.2/2020 : Informasi tersebut belum didokumentasikan/tidak dikuasai PPIID Provinsi Jawa Timur	13 Januari 2020
2.	4 Februari 2020	Danu Wibisono	Perorangan	1. Salinan dana penerima hibah dan bansos Biro Adm Pembangunan 2. Permohonan salinan data penerima nama-nama pengurus dana hibah dan bansos tahun 2019 yang diserahkan pada masyarakat /lembaga/ormas	Kontrol Sosial dan mendorong pemerintah provinsi jatim unruk terbuka dan transparan terhadap public dan masyarakat dalam pengelolaan dana hibah	Dijawab Melalui surat tanggal 26 Februari 2020, nomor 065/1195/114.2/2020 : didokumentasikan/tidak dikuasai PPIID Provinsi Jawa Timur dan dimohon untuk melengkapi persyaratan sesuai mekanisme yang berlaku	26 Februari 2020
3.	12 Februari 2020	Annisa Putri Afifa	Perorangan	Laporan Keuangan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019	untuk penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul "Tinjauan atas Penerapatan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemprov. Jatim" dan sebagai syarat kelulusan perkuliahan di Politeknik Keuangan Negara STAN.	Dijawab Melalui surat tanggal 26 Februari 2020, nomor 065/1195/114.2/2020	24 Februari 2020
4.	25 Februari 2020	Justitia Legal Advocay Bureau	LSM	Copy sertifikat hak milik atas nama Suapril Alianto	Untuk memberikan bukti hak atas kepemilikannya yang bersangkutan	Dijawab Melalui surat tanggal 28 Februari 2020, nomor 065/1256/114.2/2020 : Kesalahan Tujuan PPIID yang seharusnya PPIID Kota Sby	28 Februari 2020
5.	20 Maret 2020	Eka Chandra Wibawa	Perorangan	Permohonan dana penerima hibah dan bansos Jatim 2019	Untuk mempelajari dan mencocokkan kegiatan	Dijawab Melalui surat tanggal 31 Maret 2020, nomor 065/1827/114.2/2020 : Permohonan informasi yang diminta tidak jelas	31 Maret 2020
6.	1 April 2020	Budiwiono Malang	Perorangan	Update pemutakhiran produk okum atau peraturan perundangan yang dikeluarkan Pemprov Jatim terutama yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan (k3L) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Audit terkait dengan implementasi K3L dan ESDM	Dijawab Melalui surat tanggal 6 April 2020, nomor 065/1939/114.2/2020 : - Disarankan melengkapi persyaratan sesuai mekanisme permohonan - Disarankan membuka link jdih.jatimprov.go.id	6 April 2020
7.	1 Mei 2020	Arwana Studio Konsultan Jalan dan jembatan (Adana Qulbi Panji Islami)	Organisasi	Peta kawasan lindung	Sebagai data study kelayakan jalan penghubung lintas utara Jawa dan lintas tengah Jawa	Dijawab Melalui email dan surat tanggal 11 Mei 2020, nomor 065/2552/114.2/2020 : - Mencantumkan tujuan yang jelas - Disarankan melengkapi persyaratan sesuai mekanisme permohonan	11 Mei 2020
8.	5 Mei 2020	Miftahul Ullum	perorangan	Mohon untuk memverifikasi data aplikasi radar bansos yang bersangkutan	Untuk mendapatkan bantuan sosial	Dijawab melalui telp tgl 11 Mei 2020 Pukul 12.15 namun tidak dijawab : - Data entry akan menjadi pertimbangan untuk pendistribusian bantuan dengan memperhatikan koordinasi lintas instansi dan bukan merupakan konfirmasi telah menjadi sasaran penerima bantuan - Data yang masuk akan diverifikasi lebih lanjut sebagai bahan perencanaan pemberian bantuan kepada masyarakat - Terkait aduan, dapat menggunakan platform melalui aplikasi cettar Jatim dan LAPOR	11 Mei 2020
9.	12 Mei 2020 (melengkapi berkas)	Arwana Studio Konsultan Jalan dan jembatan (Adana Qulbi Panji Islami)	Organisasi	Data dari Kab. Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Nganjuk, Kab Situbondo, Kab Bondowoso dan Kab Jember : -Data traffic pada jalan di ke 6 Kabupaten tsb -Data lalu lintas darat dan laut di ke 6 Kabupaten tsb -Peta kawasan lindung di ke 6 Kabupaten tsb -Permintaan Rancangan RT RW dan peta RT RW Jawa timur -Permintaan rancangan pengembangan transportasi dan peta pengembangan transportasi JAwa Timur -Permintaan rancangan pemngembangan jaringan jalan dan peta pengembangan jaringan jalan Jawa Timur -Lokasi situs sejarah di Jawa Timur dan atau peta sejarah -Peta Sumber Mineral -Permintaan data statistic ekonomi dan keuangan di 6 Kabupaten tsb.	1. Memperoleh kajianrencana pengembangan jalanpenghubung lintas utara dan lintas tengah pulau Jawa 2. Mendapatkan hasil studi kelayakan pengembangan jalan penghubung tersebut	Dijawab Melalui surat tanggal 15 Mei 2020, nomor 065/2656/114.2/2020 : Permohonan informasi tersebut di teruskan ke : - Dinas Perhubungan Prov. Jatim - DLH Prov. Jatim - Bappeda Prov. Jatim - Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim - Disbudpar Prov. Jatim - Dinas ESDM Prov. Jatim - Biro Adm. Perekonomian Prov. Jatim	
10.	31 Mei 2020	Azzuri Inggil Pambudi	Perorangan (mahasiswa)	-Alokasi data DBHCHT 2015-2018 di jatim -Alokasi data DBHCHT di jatim yang disalurkan untuk kepentingan bahan baku	Sebagai data dalam pengerjaan karya tulis Tugas Akhir	- Dijawab melalui surat No : 065/3038/114.2/2020 Permohonan informasi tersebut diteruskan ke Biro Adm. Perekonomian Setda	12 Juni 2020

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

				tembakau -Nilai DBHCHT yang disalurkan kepada petani tembakau di Jati untuk biaya peningkatan produksi 2015-2018		Prov. Jatim - Dijawab dan dipenuhi oleh Biro Perekonomian Melalui surat ke Dinas Kominfo Jatim tanggal 6 Juli 2020 Nomor 976/9136-1/021.3/2020	6 Juli 2020
11.	6 Juni 2020	Arwana Studio Konsultan Jalan dan jembatan (Adana Qulbi Panji Islami)	Organisasi	Informasi kejadian banjir di Kab. Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Nganjuk, Kab Situbondo, Kab Bondowoso dan Kab Jember	1.Memperoleh kajianrencana pengembangan jalanpenghubung lintas utara dan lintas tengah pulau Jawa 2.Mendapatkan hasil studi kelayakan pengembangan jalan pengubung tersebut	Dijawab melalui surat No : 065/3039/114.2/2020 Permohonan informasi tersebut diteruskan ke Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim dan BPBD Prov. Jatim	12 Juni 2020
12	4 Juli 2020	R. Ayu Nadia Nur Soraya	Perorangan	Realisasi obyek pajak kendaraan bermotor berdasarkan jenis pertahun anggaran 2013-2019 Prov. Jatim	Sebagai data dalam penelitian skripsi	Dijawab melalui surat No : 065/3771/114.2/2020 Permohonan informasi tersebut diteruskan ke Bapenda Prov. Jatim	20 Juli 2020
13	6 Juli 2020	Diana Istislam	Perorangan	SK Gub tentang pemberian ijin perpanjangan hak guna bangunan atau peningkatan hak menjadi hak milik terhadap tanah Dallam kekuasaan Negara	Dapat melakukan masa perpanjanagn hak sertifikat guna bangunan atau pengingkatan hak milik terhadap tanah dalam kekuasaan Negara	Dijawab melalui surat No : 065/3768/114.2/2020 Permohonan informasi di tolak karena merupakan permohonan administrasidan disarankan untuk mengajukan permohonan ke Gubernur Jatim cq. BPKAD Jatim	20 Juli 2020
14	22 Juli 2020	Saleh Alhasni	Perorangan	Salinan Surat Gubernur Jawa Timur : 1. No.BPPD. 013.3/264/79 tanggal 30 Maret 1979 2. No. BPPD 011.3/347/1980 tanggal 16 Mei 1980 3. No. 552.3/8533/631/1981 tanggal 13 April 1981	Untuk mengetahui adanya batas-batas yang menjadi pertimbangan sesuai aturan yang berlaku saat ini dan untuk mengetahui dimana letak batas-batas yang menjadi pertimbangan Gubernur Jawa Timur dan _las an pertimbangan tersebut, agar kami yang berada di daerah tersebut sejak 1959 ingin mengetahui dasar pertimbangannya tersebut	Dijawab Melalui surat tanggal 5 Agustus 2020, nomor 065/4040/114.2/2020 : Bahwa data yang diminta tidak dalam penguasaan PPID Prov. Jatim	5 Agustus 2020
15	11 Agustus 2020	Eka Candra Wibawa	Perorangan	Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerima bantuan hibah tahun 2020	Untuk kajian ilmiah	Dijawab Melalui surat tanggal 25 Agustus 2020, nomor 065/4203/114.2/2020 : Bahwa disarankan memperjelas permohonan informasi yang diminta dengan melampirkan TOR /proposals kajian	25 Agustus 2020
16	2 September 2020	Muhammad Nurcahyo	Perorangan	Salinan DPA dan LRA Diskominfo Jatim Bidang IP dan KP tahun anggaran 2018 dan 2019	untuk mengetahui detail program pada kedua bidang tersebut berikut realisasi program dan penggunaan anggarannya.	Dijawab Melalui surat tanggal September 2020, nomor 065/114.2/2020 : Diberikan ringkasan DPA dan LRA Diskominfo Jatim Bidang IP dan KP tahun anggaran 2018 dan 2019	24 September 2020
17	5 September 2020	Elinda Purwanti	Perorangan	Informasi mengikuti pelatihan anestesi/HD di RSSA Malang	Melamar pekerjaan menjadi pegawai tidak tetap BLUD non PNS di RSUD dr. Saiful Anwar Maang	Dijawab melalui WA, diberikan informasi alamat dan nomor telepon RSSA Malang	17 September 2020
18	16 September 2020	Roesma Fakhanna Fiddin Jombang	Perorangan	Informasi mengenai Kartu Keluarga	Mengetahui informasi kartu keluarga	Dihubungi melalui telp tanggal 17 September 2020 pukul 13.20, namun nomor pemohon tidak terdaftar	17 September 2020
19	26 Oktober 2020	Alvin Juliansyah Putra	Perorangan	Laporan keuangan dari tahun 2014 hingga tahun 2019, laporan realisasi anggaran (LRA) dari tahun 2014 hingga tahun 2019, laporan operasional (LO), dari tahun 2014 hingga tahun 2019, karena yang dibutuhkan Pendapatan asli daerah, bantuan pemerintah pusat atau propinsi yang di pinjamkan, realisasi Penerimaan Pad, target penerimaan Pad yang ditetapkan, dan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan dari tahun 2014 hingga tahun 2019.	Untuk kebutuhan penelitian atau sedang melakukan skripsi	Disarankan melengkapi permohonan informasi yang diminta dengan melampirkan TOR /proposals kajian, Surat keterangan dari Universitas.Menyarankan membuka link transparansi.jatimprov.go.id	16 Nopember 2020
20	10 Nopember 2020	Rahmat Faisal Koordinator Kontras	Organisasi	- Informasi dan dokumen tentang besaran jumlah biaya operasional serta peruntukannya selama unjuk rasa tanggal 8 dan 20 Oktober 2020 di Gedung Grahadi - Informasi dan dokumen tentang laporan dan evaluasi paskah unjuk rasa tanggal 8 dan 20 Oktober 2020 di Gedung Grahadi - Informasi dan dokumentasi besaran jumlah biaya perbaikan fasilitas gedung Grahadi setelah unjuk rasa tanggal 8 dan 20 Oktober 2020 di Gedung Grahadi	Untuk mendorong dan mengkampanyekan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif efisien dan akuntabel	Dijawab melalui surat tanggal 23 Nopember 2020 bahwa permohonan informasi tidak berada dalam penguasaan PPID Provinsi Jawa timur dan disarankan untuk mengajukan permohonan tersebut ke PPID terkait yang menangani beserta melengkapi persyaratan permohonan sesuai mekanisme yang berlaku	23 Nopember 2020

ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2020

1. **Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi**

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Pergub Jatim No. 8 Tahun 2018.

2. **Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak**

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan Atau ditolak
2020	2	7	11
2019	4	3	9
2018	2	3	5

Jumlah permohonan informasi yang masuk di PPID Provinsi Jawa Timur, sebagian besar data/informasi yang diminta belum didokumentasikan di PPID Provinsi dan atau ada dalam penguasaan PPID Pembantu/SKPD terkait dengan data/informasi yang diminta.

B A B IV

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Aplikasi Sisitem Keterbukaan Publik Online (SIKIPO) ke OPD dan Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ;
3. Membuka klinik PPID atau ruang konsultasi PPID ;
4. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Uji Konsekuensi bagi PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PPID Badan Publik Kabupaten / Kota di Jawa Timur ;
5. Rencana pembentukan Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FK PPID) Provinsi Jawa Timur ;
6. Rencana Rakor SP4N-LAPOR! bagi Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Monitoring dan evaluasi SP4N-LAPOR! bagi Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Monitoring dan evaluasi PPID bagi Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Kegiatan SP4N-LAPOR! *Goes to Campus*.

BAB V

Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2020

PPID Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur melalui Self Assesment Questioner (SAQ) dan visitasi.

Berikut hasil monitoring dan evaluasi :

A. Perangkat Keterbukaan Informasi Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

OPD di Lingkungan Pemprov Jatim

NO	BADAN PUBLIK	SAQ (60%)	Lap. Tbn (10%)	Lay. Info (30%)						GRAND TOTAL	KATEGORI
				PI & MG (40%)		Visit (30%)	Wncra (30%)	TOTAL (30%)	30%		
				PI (20%)	MG (20%)						
1	Dinas Kesehatan	55.29	8	10	16.6	25.398	27	78.998	23.6994	87	B
2	RSSA	52.27	8	10	20	25.332	24.501	79.833	23.9499	84	B
3	Dinas Sosial	53.00	0	20	20	22.665	20.001	82.666	24.7998	78	C
4	RS Haji	52.46	8.3	0	5.8	16.548	21.501	43.849	13.1547	74	C
5	Bakorwil Jember	45.60	6.2	0	15	24	24	63	18.9	71	C
6	Dinas Pendidikan	50.64	0	5	15.8	21.414	24.399	66.613	19.9839	71	C
7	Rumah Sakit Jawa Timur	46.26	7.5	0	3.2	21.666	21	45.866	13.7598	68	C
8	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo	50.43	6.9	0	0	11.265	20.001	28.266	8.4798	66	C
9	RS Soedono	50.40	0	0	16.6	5.4	22.401	44.401	13.3203	64	C
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.80	0	0	0	22.431	21	43.431	13.0293	60	C
11	KPU Jatim	45.30	6.8	0	0	0	0	0	0	52	D
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44.30	0	10	0	0	0	10	3	47	D
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	43.06	0	0	0	0	0	0	0	43	D
14	Badan Pendapatan Daerah	36.00	7	0	0	0	0	0	0	43	D
15	Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	37.82	0	10	0	0	0	10	3	41	D
16	Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	38.47	0	0	0	0	0	0	0	38	E
17	Bappeprov Jatim	33.73	0	0	0	0	0	0	0	34	E
18	Bawaslu Jatim	33.51	0	0	0	0	0	0	0	34	E

OPD di Lingkungan Pemprov Jatim

NO	BADAN PUBLIK	SAQ (60%)	Lap. Tbn (10%)	Lay. Info (30%)						GRAND TOTAL	KATEGORI
				PI & MG (40%)		Visit (30%)	Wncra (30%)	TOTAL (30%)	30%		
				PI (20%)	MG (20%)						
19	Badan Kepegawaian Daerah	31.13	0	5	0	0	0	5	1.5	33	E
20	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	31.41	0	0	0	0	0	0	0	31	E
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.06	0	0	0	0	0	0	0	26	E
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.50	0	10	0	0	0	10	3	19	E
23	Bakorwil Madiun	18.34	0	0	0	0	0	0	0	18	E
24	Bakorwil Pamekasan	18.06	0	0	0	0	0	0	0	18	E
25	Bakorwil Bojonegoro	16.47	0	0	0	0	0	0	0	16	E
26	BPSDM	15.33	0	0	0	0	0	0	0	15	E
27	Dinas Perkebunan	13.41	0	0	0	0	0	0	0	13	E
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.13	0	0	0	0	0	0	0	13	E
29	Bakorwil Malang	7.83	0	0	0	0	0	0	0	8	E
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.40	0	10	0	0	0	10	3	5	E
31	Dinas Energi dan SDM	0.00	0	10	0	0	0	10	3	3	E
32	Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0	5	0	0	0	5	1.5	2	E
33	Badan Penghubung Daerah	1.20	0	0	0	0	0	0	0	1	E
34	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	E

B. Peringkat Keterbukaan Informasi Tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Kab/Kota se-Jawa Timur											
NO	BADAN PUBLIK	SAQ (60%)	Lap. Thn (10%)	Lay.Info (30%)						GRAND TOTAL	KATEGORI
				PI & MG		Visit (30%)	Wncra (30%)	TOTAL (30%)	30%		
				PI (20%)	MG (20%)						
1	Kab Bojonegoro	60.0	10.0	10.0	20.0	30.0	28.5	88.5	26.6	97	A
2	Kota Madiun	59.8	6.0	20.0	20.0	30.0	28.5	98.5	29.6	95	B
3	Kab Pacitan	58.5	10.0	10.0	20.0	27.8	28.5	86.3	25.9	94	B
4	Kota Probolinggo	58.0	7.0	10.0	20.0	27.0	24.3	81.3	24.4	89	B
5	Kab Situbondo	55.3	7.0	0.0	16.7	28.3	18.2	63.2	19.0	81	B
6	Kab Blitar	52.9	5.3	20.0	0.0	16.3	26.3	62.6	18.8	77	C
7	Kab Nganjuk	51.2	2.0	10.0	20.0	24.3	24.0	78.3	23.5	77	C
8	Kab Pamekasan	49.9	2.0	0.0	16.6	28.7	24.5	69.7	20.9	73	C
9	Kota Malang	51.0	5.3	0.0	12.8	15.5	25.5	53.8	16.1	72	C
10	Kota Blitar	50.2	10.0	10.0	13.2	23.7	21.0	67.9	20.4	71	C
11	Kab Malang	49.0	0.0	0.0	20.0	25.7	25.2	70.9	21.3	70	C
12	Kabupaten Ponorogo	49.4	0.0	10.0	3.2	17.3	19.7	50.2	15.1	64	C
13	Kab Sidoarjo	47.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	50	D
14	Kab Trenggalek	42.7	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	46	D
15	Kab Mojokerto	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46	D
16	Kota Surabaya	41.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	44	D
17	Kab Banyuwangi	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44	D
18	Kab Lumajang	39.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	42	D

Kab/Kota se-Jawa Timur											
NO	BADAN PUBLIK	SAQ (60%)	Lap. Thn (10%)	Lay.Info (30%)						GRAND TOTAL	KATEGORI
				PI & MG		Visit (30%)	Wncra (30%)	TOTAL (30%)	30%		
				PI (20%)	MG (20%)						
19	Kota Batu	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41	D
20	Kota Mojokerto	39.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.5	41	D
21	Kab Bondowoso	35.9	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	39	E
22	Kab. Jombang	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38	E
23	Kab Ngawi	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37	E
24	Kab Sumenep	33.4	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	36	E
25	Kab Kediri	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31	E
26	Kab Tuban	28.9	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.5	30	E
27	Kabupaten Ngawi	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28	E
28	Kab Madiun	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19	E
29	Kab Tulungagung	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18	E
30	Kab Probolinggo	14.7	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.5	16	E
31	Kota Pasuruan	12.7	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	16	E
32	Kab Pasuruan	12.5	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	15	E
33	Kab Lamongan	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	E
34	Kab Magetan	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	E
35	Kab Sampang	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	E

C. Peringkat Keterbukaan Informasi Tingkat Desa se Jawa Timur

Desa se-Jawa Timur								
NO	BADAN PUBLIK	SAQ (60%)	Lap. Thn (10%)	Lay.Info (30%)			GRAND TOTAL	KATEGO RI
				Visit (15%)	Wncra (15%)	TOTAL (30%)		
1	Ds. Kedungsumber Bojonegoro	58.4	8.3	13.5	13	26.5	93	B
2	Ds. Prayungan Bojonegoro	59.0	7.5	10.62	13.75	24.37	91	B
3	Ds. Donorojo Kab. Pacitan	49.0	0	10.53	12.75	23.28	72	C
4	Ds. Gaprang Kab. Blitar	42.6	0	8.53	12.75	21.28	64	C
5	Ds. Loceret Nganjuk	37.9	0	7.33	11.75	19.08	57	D
6	Ds. Karangpatihan Ponorogo	37.5	0	0	0	0	38	E
7	Ds. Cengkok Nganjuk	35.0	0	0	0	0	35	E
8	Ds. Ngumbul Pacitan	31.1	0	0	0	0	31	E
9	Ds. Banggle Kab. Blitar	23.8	0	0	0	0	24	E
10	Ds. Cermee Bondowoso	20.1	0	0	0	0	20	E
11	Ds. Alasmalang Situbondo	11.4	0	0	0	0	11	E
12	Ds. Jenu Kab. Tuban	10.0	0	0	0	0	10	E
13	Ds. Ambulu Bondowoso	7.7	0	0	0	0	8	E
14	Ds, Sumbergondo Batu	7.4	0	0	0	0	7	E
15	Ds. LABRUK LOR Lumajang	4.0	0	0	0	0	4	E
16	Ds. Pulosari Jombang HERMA	2.9	0	0	0	0	3	E
17	Ds. Bringin Nonggal Sampang	0.0	0	0	0	0	0	E
18	Ds. Pasirian Lumajang	0.0	0	0	0	0	0	E
19	Ds. Patarongan Sampang	0	0	0	0	0	0	E

B A B VI

Kesimpulan

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Pemerintah PPID Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Selaku

Ketua PPID Provinsi Jawa Timur



Drs. BENNY SAMPIRWANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650718199003 1 005

Lampiran

PENGHARGAAN DAN TELAHAH PPID PROVINSI JAWA TIMUR

I. PENGHARGAAN PPID PROVINSI JAWA TIMUR

2010	
1	Pada tahun 2010 Jawa Timur berhasil meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Provinsi Kedua yang membentuk Komisi Informasi.
2011	
2	Penghargaan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Pemprov Jatim sebagai Badan Publik terbaik tingkat Provinsi untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dalam penyediaan pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai Undang-Undang No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) melalui Forum Pemingkatan pada tahun 2011.
2012	
3	Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat untuk kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat pada puncak peringatan “Hari Hak untuk Tahu Internasional (International Right to Know Day)” pada tanggal 28 September 2012.
4	Pada awal tahun 2012, Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan dari Yayasan Tifa dan Fisipol Universitas Gajah Mada, sebagai Provinsi terbaik dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2013	
5	PPID Jatim memperoleh penghargaan peran dan fungsi PPID terbaik se Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri penghargaan diberikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Revitalisasi Peran dan Fungsi PPID se Indonesia di Millenium Hotel Sirih Jakarta, 21-23 Oktober 2013.
6	Desember 2013, PPID Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan KIP Award 2013, sebagai Provinsi terbaik kedua dalam penyelenggaraan implementasi Undang -Undang Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wakil Presiden Jakarta.
7	Penghargaan Khusus sebagai Badan Publik Pendorong implementasi UU KIP
2014	
8	PPID Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat masuk 10 besar sebagai Badan Publik dalam rangka implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wakil Presiden Jakarta, Desember 2014 (peringkat 10 besar disebabkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum mengupload Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah pada Website hingga pada tahap supervise pada bulan November 2014, tidak ada dukungan DIP dan Klasifikasi Informasi Publik di PPID SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berikut transparansi pengelolaan anggaran yang bisa di Link).
2015	
9.	PPID Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dan meraih Peringkat ke 2 (dua) di Tingkat Nasional dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik Pemertintah Provinsi (Implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP). Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden RI kepada Gubernur Jawa Timur di Istana Negara di Jakarta.
2016	
10.	PPID Provinsi Jawa Timur berhasil meraih Peringkat Pertama (1) di Tingkat Nasional dalam rangka Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi, sekaligus dinilai KI Pusat sebagai PPID Level Inovasi. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Atasan PPID Provinsi Jawa Timur di Istana Wakil Presiden pada tanggal 20 Desember 2016.
2017	
11	PPID Provinsi Jawa Timur tidak ikut berpartisipasi dalam Pemingkatan Tahun 2017 namun tetap memfokuskan peningkatan SDM serta kualitas pelayanan informasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik. (Surat ke Komisi Informasi Pusat Nomor : 065/2797/114.2/2017)

	(surat ke Gubernur Jawa Timur Nomor : 065/2503/114.2/2017)
2018	
12.	PPID Provinsi Jawa Timur meraih Peringkat sepuluh dengan predikat cukup informatif di Tingkat Nasional dalam rangka Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 5 November 2018.
2019	
13.	PPID Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi menuju informatif. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 21 November 2019.
2020	
14.	PPID Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi cukup informatif. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI melalui daring (aplikasi zoom) pada tanggal 25 November 2020.

II. EVALUASI

2010	
1	Pada tahun 2009 melakukan sosialisasi UU KIP di 14 Kabupaten/ Kota di Jawa timur
2	PPID Prov. Jatim pada tahun 2010 melakukan Sosialisasi UU KIP di Badan / Dinas / BUMN / BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3	Membentuk Komisi informasi pada Mei 2010
2011	
4	PPID Prov. Jatim Beserta Tim Teknis Dan dipimpin Bapak Asisten IV Setda Prov. Jatim merumuskan dan menyusun Pergub 55 Dan 65 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Prov. Jatim
5	PPID Prov. Jatim mengirim surat kepada seluruh SKPD di lingkungan prov. Jatim untuk membentuk PPID sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 8 April 2011 Nomor : 489/1293/SJ, perihal untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebelum tanggal 23 Agustus 2011 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di Indonesia.
2012	
6	Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan dari Komisi linformasi Pusat untuk kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat sedangkan untuk informasi yang disediakan secara berkala Prov. Jatim masih tertinggal jauh dari prov. Jawa Barat dan DKI Jakarta karena website Prov. Jatim belum sepenuhnya memuat Daftar informasi publik (Penghargaan diberikan dalam dua kategori penilaian yakni berdasarkan penyediaan informasi publik yang wajib diumumkan (melalui website) dan informasi yang wajib tersedia setiap saat di Badan Publik).
2013	
7	PPID Provinsi Jawa Timur kalah dengan Provinsi Kalimantan Timur terkait transparansi anggaran yang belum sepenuhnya diupload di masing-masing website SKPD, sedangkan website Kalimantan Timur sudah menyediakan informasi terkait transparansi anggaran.
2014	
8	Sinergitas dan koordinasi Anggota PPID Provinsi Jawa Timur (sesuai SK Gubernur Jatim) kurang menunjukkan perannya/dukungan
9	Penyajian Transparansi Pengelolaan Anggaran dalam Website kurang mendapat dukungan dari SKPD (berpengaruh pada pemeringkatan oleh Komisi Informasi / KI Pusat), tindaklanjut Surat Edaran Gubernur Jatim, 29 Oktober 2014
10	Perlu penyempurnaan SOP (baik SOP Umum maupun SOP teknis) ;
11	Perlu penyempurnaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi Publik (seluruh SKPD / perlu dukungan dari SKPD) ;
12	Sistem Informasi Publik (SIP) PPID aplikasi sudah siap namun sampai sekarang, belum diimplementasi dan terintegrasi dengan website (sistem pelayanan informasi terintegrasi) sehingga berpengaruh pada pemeringkatan oleh Komisi Informasi/KI Pusat ;
13	Dukungan Lintas Sektor SKPD dan Internal Dinas Kominfo perlu ditingkatkan ;
14	Website PPID Provinsi Jawa Timur belum menampilkan transparansi anggaran di website minimal sesuai dengan pasal 9 UU No 14 / 2008 tentang KIP atau Perki 1 pasal 11 ayat 1 (d), yaitu ringkasan laporan keuangan yang sekurang kurangnya terdiri atas : 1.1 Rencana dan laporan realisasi anggaran 1.2 Neraca 1.3 Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku 1.4 Daftar aset dan investasi (berpengaruh pada pemeringkatan oleh Komisi Informasi /KI Pusat) ;
15	Frontdesk PPID tidak memenuhi syarat/perlu peningkatan (belum ada ruang khusus PPID Prov, Jatim);
16	Banyak permasalahan terkait permintaan informasi yang masuk ke PPID Provinsi Jawa Timur, disebabkan PPID Pembantu/SKPD ybs tidak merespon dengan cepat / kurang tanggap sehingga membuka peluang terjadinya sengketa informasi ;

17	Alokasi anggaran untuk PPID Provinsi dan Badan Publik/SKPD
18	Penyempurnaan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi, online (website) maupun offline
2015	
19	Menetapkan standar format konten PPID di lingkup PPID Pembantu/SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Timur selaku Atasan PPID
20	Penyempurnaan Standar Opresional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik lintas Sektoral Badan Publik SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
21	Melaksanakan desk dan Bimbingan Teknik dalam rangka penguatan Peran dan fungsi PPID Badan Publik SKPD Provinsi dan Badan Publik Kabupaten / Kota di Jawa Timur
22	Menyusun Klasifikasi Informasi Publik
23	Monitoring dan evaluasi Implementasi KIP di Badan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
2016	
24	Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik bagi PPID Pembantu/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
25	Sosialisasi standar format konten PPID bagi PPID Badan Publik Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
26	Bimbingan Teknik Penguatan PPID Badan Publik Provinsi dan PPID Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Timur
27	Melaksanakan uji konsekuensi Informasi yang dikecualikan
28	Menyajikan informasi dalam website tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Inpres No 7 Tahun 2015
29	Mengumpulkan dan Inventarisasi dokumen Informasi Publik dari PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
30	Cepat tanggap atau respon terhadap permohonan informasi, khususnya bagi PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
31	Revisi SOP dan Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di PPID Provinsi Jawa Timur
2017	
32	Mengumpulkan dan Inventarisasi dokumen Daftar Informasi Publik dari PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
33	Cepat tanggap atau respon terhadap permohonan informasi, khususnya bagi PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
34	Bimbingan Teknik (Bimtek) Petugas Help Desk PPID SKPD dan Kab/Kota se-Jatim
35	Rakor PPID SKPD dan Kab/Kota se-Jatim
36	FGD PPID provinsi Jawa Timur
37	Revisi Peraturan Gubernur 55 dan 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di PPID Provinsi Jawa Timur dan SOP sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
38	Bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi PPID di lingkungan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur
2018	
39.	Pembuatan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
40.	Pembuatan 5 SOP Penyusunan DIDP, Pelayanan Permohonan Informasi, Penanganan Keberatan Informasi Publik, Fasilitasi Sengketa Informasi dan Uji kOnsekuensi
41.	Pembuatan SK SP4N-LAPOR! OPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur
2019	
42.	Bimbingan Teknik Petugas Help desk PPID se wilayah kerja Bakorwil di Jawa Timur
43.	FGD dan Rakor PPID Provinsi Jawa Timur
44.	Sosialisasi SP4N-LAPOR! di lingkungan OPD dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur
45.	Pengembangan Aplikasi SIKIPO
2020	
46.	FGD dan Rakor PPID Provinsi Jawa Timur
47.	Bimbingan Teknik Uji Konsekuensi PPID di lingkungan OPD dan Kabupaten/Kota se Jawa

	Timur
48.	Monitoring dan Evaluasi PPID Kabupaten/Kota di lingkungan Bakorwil Provinsi Jawa Timur
49.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Kabupaten/Kota di lingkungan Bakorwil Provinsi Jawa Timur
50.	Rakor Penguatan Peran PPID di lingkungan OPD dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur
51.	Rakor Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! di lingkungan OPD dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

III. KEGIATAN PPID PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

No.	TANGGAL	INSTANSI
BULAN JANUARI		
1.	8 Januari 2020	Audensi dengan Komisi informasi Provinsi Jawa Timur
BULAN FEBRUARI		
2.	27 Februari 2020	Kunjungan dari mahasiswa Universitas Islam Majapahit Mojokerto
BULAN MARET		
3.	2 Maret 2020	Kunjungan kerja DPRD Sumatera Barat
BULAN APRIL		
4.	April 2020	Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid 19
BULAN MEI		
5.	6 Mei 2020	Pelatihan online fitur baru dan strategi Pengelolaan SP4N-LAPOR!
BULAN JUNI		
6.	3 Juni 2020	Konsultasi PPID dari Biro Kesejahteraan Sosial Setda Prov. Jatim
7.	10 Juni 2020	Rakor Virtual Layanan PPID Masa Pandemi Covid 19 bersama Kabupaten/Kota se Jatim
8.	18 Juni 2020	Rakor Virtual SP4N-LAPOR! bersama Pejabat Penghubung Pemprov Jatim Tahun 2020
9.	30 Juni 2020	Seminar LAPOR Goes to Campus bersama Kementerian PAN RB RI melalui zoom
BULAN JULI		
10.	7 Juli 2020	Rapat Pembahasan Materi/Bahan Persiapan Sidang Ajudikasi Non Litigasi Lanjutan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor152/XI/KI-Prov.Jatim-PS/2019 pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
11.	16 Juli 2020	Webinar dengan KI Pusat terkait Peran Milenial dalam Menangkal Hoax di Era Keterbukaan Informasi Normal Baru
12.	22 Juli 2020	Review Virtual Tindak Lanjut Pengelolaan SP4N-LAPOR! Pemprov Jatim berkolaborasi dengan Kementerian PAN RB RI Tahun 2020
BULAN AGUSTUS		
13.	19 Agustus 2020	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Kabupaten/Kota Tahun 2020
BULAN SEPTEMBER		
14.	3 September 2020	Webinar Pembahasan Aksesibilitas pelayanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas
15.	8 September 2020	Rapat Internal PPID Pembahasan Tindak Lanjut materi Jawaban Sidang Sengketa Informasi antara WALHI dengan Atasan PPID Provinsi Jawa Timur
16.	29 September 2020	Fasilitasi Sosialisasi dan Asistensi Teknis melalui Teleconference terkait Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020
BULAN OKTOBER		
17.	1 Oktober 2020	Webinar Pemberitahuan Tata cara Penyampaian Video Presentasi Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2020
18.	2 Oktober 2020	Rapat Internal PPID Pembahasan Tindak Lanjut materi Jawaban Sidang Sengketa Informasi antara WALHI dengan Atasan PPID Provinsi Jawa Timur melalui zoom.
19.	7 Oktober 2020	FGD PPID pembahasan rencana <i>monitoring</i> dan evaluasi PPID Kabupaten/Kota
20.	15-16 Oktober 2020	Rakor Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! di lingkungan OPD dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Batu
21.	16 Oktober 2020	Rapat persiapan Monitoring dan Evaluasi PPID Kabupaten/Kota di lingkungan Bakorwil Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi zoom.
22.	19-20 Oktober 2020	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Kabupaten/Kota di lingkungan Bakorwil Provinsi Jawa Timur

		gelombnag I.
23.	26-27 Oktober 2020	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Kabupaten/Kota di lingkungan Bakorwil Provinsi Jawa Timur gelombang II.
BULAN NOPEMBER		
24.	4-5 Nopember 2020	Bimbingan Teknik Uji Konsekuensi PPID di lingkungan OPD dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur
25.	10 Nopember 2020	FGD PPID Pembahasan Materi Jawaban Sidang Sengketa Informasi lanjutan antara WALHI dengan Atasan PPID Provinsi Jawa Timur.
26.	26-27 Nopember 2020	Rakor Penguatan peran PPID di lingkungan OPD dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Batu
BULAN DESEMBER		
27.	21 Desember 2020	Literi Vaksin dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Komisi Informasi Pusat melalui zoom.

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN



Konsultasi PPID Biro Kesejahteraan Sosial Prov. Jatim, Rabu 3 Juni 2020



Monev PPID Provinsi Jawa Timur ke PPID Kabupaten Gresik, 20 Oktober 2020



Rakor Pengelolaan SP4N-LAPOR! di lingkungan Perangkat Daerah Prov. Jatim dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Batu, 15-16 Oktober 2020



Monev PPID Provinsi Jawa Timur ke PPID Kabupaten Bangkalan, 26 Oktober 2020



Monev PPID Provinsi Jawa Timur ke PPID Kabupaten Sumenep, 26 Oktober 2020



FGD PPID Pembahasan Materi Jawaban Sidang Sengketa Informasi lanjutan di Dinas Kominfo Prov. Jatim, 10 Nopember 2020



Bimtek Uji Konsekuensi PPID di lingkungan Perangkat Daerah Prov. Jatim dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Batu, 4-5 Nopember 2020



Rakor Penguatan Peran PPID di lingkungan Perangkat Daerah Prov. Jatim dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Batu. 26-27 Nopember 2020